

Menyoroti Jurnalisme Warga: Lintasan Sejarah, Konflik Kepentingan, dan Keterkaitannya dengan Jurnalisme Profesional

Aryo Subarkah Eddyono, Faruk HT, dan Budi Irawanto
Kajian Budaya dan Media Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta -
Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie, Jakarta
Email: aryo.subarkah@gmail.com

Abstract

Citizen journalism is the process of producing information that ordinary citizens do for events that occur around them in various media. Although it looks egalitarian and inclusive, in reality, the practice of citizen journalism is lame and discriminatory. This article shows the beginnings of the journey of citizen journalism and what things are behind it. This study aims to provide an alternative view of the initial presence of citizen journalism, both in the world and in Indonesia. Data were obtained through interviews with stakeholders who understood the early history of citizen journalism, observation, documents, and literature. Citizen journalism is a long-standing practice, even older as journalism itself. Citizen journalism arises because of criticism professional journalism which is in favor of certain political interests and is too market-oriented; the development of internet technology; situations where professional journalism from its inception cannot be separated from citizens; and the profit motive. Behind it all, the big interests that imagine it are journalism itself (professional journalism), democracy (freedom of expression and opinion), and markets. All three are interrelated in motivating the presence of citizen journalism.

Keywords: *Citizen Journalist, Professional Journalism, Democracy, Capital, Media Conglomerate*

Abstrak

Jurnalisme warga, yang praktiknya masih bisa ditemui, adalah proses produksi informasi yang dilakukan warga biasa atas peristiwa yang terjadi di sekitarnya di berbagai media. Meskipun terlihat egaliter dan inklusif, pada kenyataannya praktik jurnalisme warga timpang dan diskriminatif. Artikel ini menunjukkan awal mula perjalanan jurnalisme warga dan hal apa saja yang melatarinya. Tujuannya adalah memberikan alternatif pandangan awal mula kehadiran jurnalisme warga, baik di dunia maupun di Indonesia. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumen, serta kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jurnalisme warga sudah sejak lama ada, bahkan lebih tua dari jurnalisme itu sendiri. Jurnalisme warga muncul karena kritik atas jurnalisme profesional yang partisan dan terlalu berorientasi pada pasar; perkembangan teknologi internet; situasi di mana jurnalisme profesional sejak awal keberadaannya tidak bisa dilepaskan dari warga; dan keinginan mendapatkan keuntungan. Di balik itu semua, kepentingan-kepentingan besar yang membayangkannya adalah jurnalisme itu sendiri (jurnalisme profesional), demokrasi (kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat), serta pasar. Ketiganya saling terkait dalam memotivasi kehadiran jurnalisme warga.

Kata Kunci: Jurnalisme Warga, Jurnalisme Profesional, Demokrasi, Kepentingan Pasar, Konglomerasi Media

Pendahuluan

Tahun 2004 silam, tepatnya pada tanggal 26 Desember, Cut Putri merekam peristiwa gempa bumi dan tsunami yang melanda tempat tinggalnya di Nanggroe Aceh Darussalam. Menurut keterangan waktu dalam rekamannya, saat itu menunjukkan pukul 08.13 WIB. Video yang pernah ditayangkan di *Metro TV* dan masih bisa diakses di Youtube ini, dimulai dengan penggambaran situasi kekagetan sejumlah anggota keluarganya beberapa saat setelah gempa terjadi. Mereka berkumpul di halaman rumah. “Aceh memang jalur gempa. Tapi yang tak seperti ini (biasanya),” kata salah seorang pria dalam rekaman itu.

“Mobil goyang entah bagaimana,” suara perempuan terdengar menceritakan apa yang dilihatnya. Perbincangan seputar gempa yang dirasakan sangat kuat oleh anggota keluarga dan canda tawa masih mewarnai menit-menit awal rekaman video.

Beberapa menit berselang, video menunjukkan situasi berbeda. Suasana tidak seair sebelumnya, berubah mencekam. Para penghuni rumah sudah berada di lantai dua rumah yang mereka tinggali. Bunyi jerit histeris bercampur penyebutan nama Tuhan dan gemuruh suara air menjadi latar suara video. Tsunami melanda. Air deras dari laut melesak masuk ke daratan setinggi pohon kelapa dan menghancurkan segala benda yang menghalanginya. Tak tampak lagi jalanan, hanya genangan air tinggi membawa puing-puing. “Pegangan, pegangan, semua!” teriak seorang perempuan dalam rekaman itu.

Lantai satu rumah mereka ikut dipenuhi air. Air masuk bersama puing-puing. Hanya bagian atas tiang-tiang penyangga lantai dua sajalah yang masih terlihat. Perabot rumah mengapung ke sana ke mari mengikuti irama air. “Maaf lahir batin, Bang...” suara perempuan terisak sedih, memohon, bercampur cemas. Tangisan anggota keluarga lainnya menyusul terdengar menambah pilu. Video masih menunjukkan betapa dahsyatnya tsunami yang melanda Aceh saat itu.

Menurut BMKG, gempa yang disusul tsunami tersebut berkekuatan 9,0 SR berpusat di 3,29 LU – 95,98 BT atau 149 km selatan Meulaboh. Tak hanya di Aceh, bencana tersebut juga melanda Malaysia, Thailand, dan beberapa wilayah lain di kawasan Samudera Hindia. Di Indonesia, terutama Aceh, tsunami tersebut telah merenggut nyawa 166.080 orang. Sebanyak hampir setengah juta jiwa menjadi pengungsi, ribuan bangunan hancur (BMKG, 2018).

Dokumentasi yang dibuat Cut Putri dan sejumlah saksi mata lainnya pada bencana yang menimpa Asia Tenggara dan Timur tersebut, menurut Stuart Allan (dalam Hajek & Stefanikova, 2014), mendorong semakin meluasnya diskusi dan perdebatan mengenai jurnalisme warga di dunia. Allan mengatakan bahwa pada peristiwa itu warga biasa bisa melakukan apa yang biasanya dilakukan jurnalis, yakni merekam dan melaporkan peristiwa, dengan gayanya yang khas. Memang, saat tsunami Aceh terjadi, infrastruktur rusak parah. Jaringan komunikasi dan akses masuk terputus. Informasi yang diperoleh hanya berasal dari pihak keluarga yang berada di luar lokasi bencana yang mempertanyakan kondisi keluarga mereka. Dari situlah media melakukan penelusuran dengan mewawancarai segala pihak yang berkepentingan guna melakukan verifikasi informasi. Peliputan media terhalang jalur transportasi yang terputus itu. Jurnalis dari kantor biro berita terdekat, seperti Medan, harus mencoba menembus jalur darat agar bisa masuk ke lokasi bencana untuk mendapatkan

informasi. Di Jakarta dan Medan, secara bertahap, dengan menumpang pesawat Hercules milik TNI, satu demi satu tim liputan dari berbagai media diberangkatkan. Sehingga tidak heran penggambaran saat peristiwa terjadi didominasi berasal dari dokumentasi warga, seperti yang dilakukan Cut Putri. Kalaupun ada jurnalis profesional yang memiliki gambar saat peristiwa terjadi, skalanya terbatas karena saat peristiwa mereka juga turut menjadi korban, termasuk juga keluarganya. Kantornya pun hancur diterjang tsunami. Infrastruktur komunikasi yang terputus menghambat penyampaian informasi ke jaringan media di luar Aceh.

Jurnalisme warga adalah praktik produksi dan penyebarluasan informasi yang berasal dari warga biasa yang disampaikan secara khas. Lasica (2003) menyebutnya sebagai model jurnalisme yang mengakomodasi siapapun (masyarakat biasa, bukan jurnalis profesional) untuk menyampaikan informasi atas peristiwa apapun (dan segala hal yang terkait dengan itu) di berbagai media, termasuk media pers profesional ataupun independen seperti *blog*. Defenisi lain, jurnalisme warga merupakan praktik yang timpang dan diskriminatif (Eddyono, HT, & Irawanto, 2019). Disebut timpang, karena tidak semua orang bisa mengaksesnya ataupun melakukannya. Terlibat dalam jurnalisme warga membutuhkan biaya dan kemampuan yang tidak dimiliki semua orang. Hanya orang-orang tertentu saja yang punya modal yang bisa melakukannya.

Hingga kini, praktik jurnalisme warga masih bisa dilihat. Bahkan media-media pers profesional turut memberikan ruang bagi warga dalam menyampaikan informasi. Ada *Kompasiana*, *NET CJ* yang tampil di berbagai program berita di *NET TV*, dan *Metro TV* juga masih mengelola konten jurnalisme warga meski *Wide Shot* tak lagi tayang. *Tempo.co* sempat menyajikan *Tempo SMS* untuk mengakomodir informasi warga, juga *Indonesiana* sebagai wahana bagi warga dalam menyampaikan beragam konten, termasuk konten jurnalisme warga. *Indonesiana* masih ada hingga kini, sementara *Tempo SMS* sudah tidak berjalan lagi (meskipun begitu, tampilannya masih tetap ada di dalam *Indonesiana*). *Radio Republik Indonesia (RRI)* juga sempat menggarap *RRI 30 Detik*. Program tersebut gagal berjalan karena kurang disiapkan dengan baik (Rohmatulloh & Yudhapramesti, 2019). Konten jurnalisme warga ditampilkan dalam sebuah kanal atau program khusus, atau jika memiliki modal yang besar media pers dominan akan menjadikannya sebagai unit bisnis sendiri (seperti *Kompasiana*).

Tapi, sebenarnya sejak kapan jurnalisme warga dan praktik yang menyerupainya mulai muncul, baik di dunia maupun di Indonesia? Apa yang melatarinya? Soal ini, dari hasil penelusuran peneliti, cukup beragam. Perbincangan soal jurnalisme warga memang telah banyak muncul di berbagai jurnal, termasuk membahas awal mula dan dinamikanya. Artikel ini bertujuan memberikan cara pandang lain dalam melihat awal kehadiran jurnalisme warga. Peneliti berupaya memberikan alternatif pijakan untuk memahami sejak kapan sesungguhnya praktik-praktik seperti jurnalisme warga telah berkembang sebelum akhirnya menjadi masif seperti saat ini dan kepentingan apa saja yang melatarinya. Harapannya, temuan ini bisa membantu, sedikit-banyak, memahami ulang pondasi dalam memahami jurnalisme warga.

Metode

Penelitian ini menggunakan data kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data berupa hasil wawancara terhadap parapihak yang memahami proses awal hadirnya jurnalisme warga. Observasi, baik *online* maupun *offline*, juga dilakukan untuk memperkaya data dan verifikasi. Termasuk juga melakukan studi pustaka dan dokumen pendukung. Data-data yang terkumpul akan dianalisis sebelum akhirnya diambil kesimpulan. Pengambilan data dilakukan sejak 2017 hingga awal 2019.

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan model validitas dialogis dan kontekstual ala Saukko. Saukko (2003:20) menjelaskan kriteria validitas dialogis adalah *truthfulness*, *self-reflectivity*, dan *polivocality*. *Truthfulness* mensyaratkan sebuah penelitian haruslah adil dalam mengakomodir pandangan-pandangan di masyarakat, sekaligus memverifikasinya. *Self-reflectivity* berarti peneliti melakukan refleksi (sadar diri) atas siapa dirinya, termasuk wacana-wacana pribadi, sosial dan paradigmatis, sehingga mampu memosisikan diri dengan baik. Upaya ini juga ditujukan untuk membantu memahami realitas masyarakat lain. *Polivocality* berarti peneliti memahami bahwa yang diteliti pada hakikatnya bukanlah realitas yang tunggal sehingga berusaha memberikan ruang bagi pandangan-pandangan berbeda. Sementara itu kriteria validitas kontekstual mengarahkan peneliti agar menempatkan fenomena yang ditelitinya dalam konteks masa lalu dan masa kini, terutama untuk menghadirkan ketimpangan-ketimpangan.

Hasil dan Pembahasan

Awal Mula dan Mengapa

Jika dirunut ke belakang, wacana keterlibatan warga dalam pemberitaan sebenarnya sudah mulai muncul sebelum bencana tsunami tahun 2004. Bahkan, benihnya bisa dilacak sebelum praktik jurnalisme profesional berkembang di dunia. Allan lebih lanjut menyebut jika ingin mengetahui asul-usul bagaimana warga terlibat dalam penyampaian informasi maka perlu melihat sejarah jurnalisme itu sendiri. Allan (dalam Hajek & Stefanikova, 2014), berasumsi bahwa praktik warga terlibat dalam penyampaian informasi sudah setara usia jurnalisme itu sendiri.

Sementara itu, Gillmor (2006) menyebut bahwa benih jurnalisme warga telah ada sejak 1700-an di mana warga menulis dan menyebarluaskan pandangannya melalui selebaran. Thomas Paine dan sejumlah anonim lainnya yang menulis pada *Federalist Paper*, oleh Gillmor, disebut sebagai warga pertama yang menyampaikan informasi di Amerika. Thomas Paine adalah intelektual antikolonial Inggris. Tulisan-tulisannya, termasuk yang disebarluaskan melalui pamfletnya sendiri, *Common Sense*, yang memberi inspirasi bagi banyak orang agar kritis terhadap berbagai hal.

Kalaulah ingin melacak lebih jauh lagi, praktik di mana warga (sebelum profesi jurnalis muncul) menyampaikan informasi bisa dilihat pada masa 100 SM di mana *Acta Diurna*, surat kabar pada masa kekaisaran Roma berupa kayu pipih yang ditempel di dinding. Informasi yang disajikan adalah informasi dari hasil pertemuan anggota senat. *Acta Diurna* ini hanya memiliki

satu sirkulasi. Tak ada ukuran pasti berapa banyak jumlah pembaca yang mengaksesnya (Baran, 2011:121-124). Penyebarluasan konten yang terdapat pada *Acta Diurna* dilakukan dari mulut ke mulut oleh siapa saja. Pendiri *Kompasiana* yang juga aktivis penyebarluasan informasi oleh warga, Pepih Nugraha (Wawancara, 3 November 2017) mengatakan bahwa praktik warga menyampaikan informasi dari mulut ke mulut itu bisa jadi awal jurnalisme warga:

“Catatan harian (*Acta Diurna*) yang sebenarnya waktu itu adalah komoditasnya para anggota parlemen. Tapi, diantara mereka itu kan bisa ditonton, ada *aja* warga *tuh* yang *ngelaporin* itu. *Ngelaporin* hasil dari *Acta Diurna* ini... Bagaimana medianya? Ya, bisa jadi dari mulut ke mulut *aja* atau ya dia *nulis* selebaran (lalu) ditempel. Karena (saat) itu belum ada mesin cetak, *toh*... Dari zaman dulu sudah ada, mereka bukan wartawan, mereka warga biasa yang tergerak untuk menulis sesuatu karena minat... Nah minat, menguasai, tidak cukup mas untuk jadi jurnalisme warga kalau tidak ada rasa ingin berbagi. Makanya disebut dalam satu judul *Citizen Journalism* yang saya tulis itu ada *sharisme*. *Sharisme* itu *sharing* kekuatan...” (Pepih Nugraha, Wawancara, 3 November 2017).

Atau kalau mau lebih jauh lagi, praktik warga dalam menyampaikan informasi telah ada sejak zaman manusia menuliskan simbol ataupun gambar di dinding gua yang menceritakan kondisi kehidupan pada masa itu. Asumsi ini muncul berdasarkan beragam pemahaman atau defenisi bahwa jurnalisme warga adalah praktik di mana warga menyampaikan informasi di sekitarnya dengan caranya yang khas untuk diketahui banyak orang.

Gillmor (2006) menyebut praktik di mana warga terlibat dalam menyampaikan informasi sebagai *grassroot journalism*. Praktik semacam ini telah muncul di berbagai peristiwa, seperti pembunuhan JFK pada 1963 di mana seorang warga berhasil merekam tragedi tersebut. Pada tahun 1990-an seorang warga merekam penyiksaan warga kulit hitam, Rodney King, yang disiksa polisi kulit putih di Los Angeles yang berlanjut pada kerusuhan rasial (lihat juga Nugraha, 2012). Atton (2003) dengan *alternative journalism*-nya bahkan memberikan penawaran agar siapa pun bisa menjalankan praktik jurnalisme di media warga sebagai bentuk kritik atas praktik jurnalisme arus utama yang menurutnya elitis. Sementara Lasica (2003), begitu pula Bowman & Willis (2003), telah menunjukkan bahwa praktik semacam ini – mereka menyebutnya *participatory journalism* – bisa dikelola dengan baik dengan beragam model meski saat itu masih banyak yang menentanginya, terutama dari kalangan jurnalis profesional. Secara teknis, Outing (2005) mengemukakan lapisan demi lapisan praktik warga dalam menyampaikan informasi. Selain jurnalisme warga, istilah sejenis yang kerap muncul untuk menunjukkan praktik warga dalam menyampaikan informasi ataupun menuliskan laporan peristiwa, yakni: *democratic journalism*, *open-source journalism*, *street journalism*, ataupun *participatory journalism* (Nugraha, 2012:20; Allan, 2009).

Pasca peristiwa tsunami 2004 yang melanda kawasan Asia Tenggara dan termasuk Asia Timur yang oleh Allan dianggap telah menjadi momentum bagi diskusi yang lebih masif lagi soal jurnalisme warga, pengakuan terhadap jurnalisme warga mulai mengalir seiring dengan perdebatannya, terutama soal kualitas dan kekhawatiran menggeser peran jurnalis profesional.

Saat itu, setidaknya, banyak media baik berbasis komersial maupun nonprofit mulai menggarapnya. Pada masa itu pula fenomena *blog* juga tengah ramai-ramainya. Berbagai peristiwa besar di dunia yang melibatkan warga sebagai penyampai informasi, juga perkembangan teknologi (terutama internet dan perangkat pendukungnya), mendorong pesatnya praktik jurnalisme warga. Pada tahun 2007, saat terjadi peristiwa penembakan di Virginia Tech University, seorang mahasiswa bernama Jamal Albarghouti yang saat itu sedang berada di lokasi merekam peristiwa itu menggunakan ponselnya. Video itu lalu dikirimnya kepada CNN. CNN kemudian menggunakannya dalam memberitakan kejadian tersebut dengan judul “*Student Shot Video*”. Video yang direkam dari jarak 70 meter dinilai sebagai liputan terbaik pada saat kejadian penembakan tersebut (Hughes, 2010:1). Kehadiran internet, sebut Allan (dalam Hajek & Stefanikova, 2014) bisa mendorong masyarakat memproduksi sebuah konten berita yang dapat digunakan oleh media arus utama sebagai sumber informasi. Hal ini memudahkan media dalam memproduksi berita. Meskipun jurnalis tidak bisa langsung datang ke lokasi kejadian, media bisa terhubung menggunakan teknologi itu.

Mengapa jurnalisme warga saat ini mendapat tempat di arena informasi? Selain perkembangan teknologi, terutama internet, yang semakin memudahkan praktik ini dilakukan, ada hal lain yang membuatnya sulit ditolak, yakni keberadaan warga yang melekat pada jurnalisme dan kritik terhadap praktik jurnalisme profesional yang utamanya mengabaikan peran warga. Faktor lainnya adalah persoalan keuntungan yang potensial diraih (lihat tabel 1).

Warga dalam praktik jurnalisme, menurut Campbell (2014), bisa dilihat dalam dua kategori, yakni jurnalisme sebagai praktik kewarganegaraan dan jurnalisme untuk kewarganegaraan. Jurnalisme untuk kewarganegaraan, yang oleh Campbell dianggap sebagai model klasik, mengarah pada fungsi pers dalam menyediakan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan buat publik. Sementara itu, jurnalisme sebagai kewarganegaraan merujuk pada pendapat bahwa jurnalisme merupakan wahana bagi warga dalam menikmati informasi secara aktif. Dalam situasi ini warga memiliki kesempatan memproduksi informasi, sekaligus menikmatinya. Oetama (2001:13) menyebut bahwa khalayak adalah rekan pers yang sangat penting sehingga ikut memengaruhi kebijakan pers (warna, isi, dan gaya). Pers tidak bisa asyik sendiri, tanpa memikirkan khalayaknya. Oetama (2001:36) menganggap bahwa pers adalah mitra masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan. Pers berupaya, sebisa mungkin, dengan teknologi yang dimilikinya menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Tujuan idealnya adalah agar masyarakat mendapatkan pencerahan dalam menjalani hidupnya. Dalam konteks Indonesia, UU Pers No. 40/1999 sangat menaruh perhatian bahwa pekerjaan pers tak bisa dilepaskan dari masyarakat. Masyarakat dapat berperan serta dalam pers sebagai pemantau dan pelapor kinerja pers serta memberi masukan kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga kualitas pers Indonesia (pasal 17 ayat 2). Jadi, tak hanya sebagai penikmat informasi, warga juga diposisikan sebagai pengawas pers itu sendiri. Tanpa publik, warga, khalayak, atau apapun istilahnya, pers tak ada artinya. Kovach & Rosenstiel (2001) bahkan menegaskan bahwa jurnalisme harus loyal kepada warga, apapun yang terjadi. Warga adalah “tuan” bagi jurnalisme itu sendiri. Apapun informasi yang dihadirkan jurnalisme idealnya bertujuan untuk kebaikan dan pencerahan warga. Kerja-kerja pers, menurut Kovach dan Rosenstiel sejatinya

untuk membangun kewarganegaraan (*citizenship*), sekaligus memenuhi hak-hak sipil warga negara demi demokrasi. “Tujuan utama jurnalisme adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan warga agar mereka bisa hidup merdeka dan mengatur diri sendiri,” demikian Kovach & Rosenstiel (2001:12).

Pada perjalanannya pers mendapat kritik karena terlalu berorientasi pada pendapatan. Terutama jika pers hanya dikuasai sedikit orang. Bagdikian (2004) menekankan bahaya yang bisa muncul jika media massa dikuasai hanya segelintir orang. Jika ini terjadi maka akan berdampak buruk pada demokrasi dan jurnalisme. Bagdikian mengamati bahwa ruang redaksi yang dikontrol oleh kekuasaan pemilik modal akan menghasilkan produk jurnalistik yang berorientasi pada pasar. Ketika masyarakat masih menjadikan media arus utama sebagai sumber informasi di mana informasi tersebut sangat dekat dengan kepentingan pasar, maka keberagaman informasi hanya menjadi mimpi. Terkonsentrasinya media pada sedikit orang juga berakibat pada gampangnya informasi diarahkan demi tujuan-tujuan politik media dan pemiliknya. Bagdikian lebih lanjut mengatakan bahwa perusahaan media memiliki anggaran yang tak sedikit untuk membedah dan menyerang balik berita-berita yang tidak mereka sukai.

Kaitan bagaimana konglomerasi media bisa berdampak buruk bagi jurnalisme juga dijelaskan oleh Kovach & Rosenstiel (2001:32). Menurutnya, akar dari kebebasan pers adalah independensi, yang berarti bebas dari sensor atau kontrol pemerintah dalam menyampaikan berita. Saat ini, hal tersebut bisa diperluas menjadi bebas dari tekanan pemilik media, pemasang iklan, partai politik dan sebagainya. Namun ketika konglomerasi media semakin menjadi-jadi, maka akan mengancam keberlangsungan jurnalisme itu sendiri. Praktik jurnalisme yang sejatinya independen dari tekanan pemilik modal, kini diarahkan untuk mementingkan modal daripada publik. McChesney (1999) menyebutkan bahwa ketika media semakin kaya, maka demokrasi akan terancam. Keberagaman informasi dan lokalitas semakin hilang diganti dengan informasi yang populis dan seragam. Padahal, keberagaman informasi merupakan ciri dari demokrasi itu sendiri.

McChesney (2008) memberikan gambaran yang lebih detail bagaimana demokrasi dirusak oleh praktik jurnalisme di Amerika Serikat. McChesney menyebutkan bahwa jurnalisme di Amerika telah gagal menjalankan perannya sebagai “anjing penjaga” atau pengawas kinerja kekuasaan dalam konteks demokrasi. Penyebabnya adalah serangan-serangan komersialisasi yang gencar dilakukan kepada jurnalisme. Lebih lanjut, McChesney (2008) mengatakan pada sejarah pers di Amerika praktik media partisan telah terjadi dan saat ini berkembang menjadi partisan-kapitalistik. Surat kabar pada masa itu dijadikan media propaganda partai atau faksi-faksi tertentu, meski tidak sampai “sejahat” media pada masa Nazi dan Stalin yang kaku dan tidak mengakomodir banyak suara. Pada masa itu pula, periklanan masih belum tumbuh seperti saat sekarang ini. Singkat kata, jurnalisme partisan akhirnya begeser pada jurnalisme yang bertujuan komersil. Masa ini ditandai dengan kehadiran pengusaha yang sadar bisa mengambil keuntungan dalam penerbitan surat kabar. Pada abad ke-19, industri surat kabar tumbuh dengan tingkat persaingan yang tinggi. Jurnalisme partisan tidak begitu saja hilang, ia tetap ada. Tapi geraknya tidak jauh-jauh pada logika untung. Arah jurnalisme berubah menyenangkan para pengiklan. Sehingga berita yang dihasilkan sebisa

mungkin bisa menarik iklan, dibandingkan menghadirkan jurnalisme yang menantang. Jurnalisme dituntut mengabdikan pada kepentingan pemilik modal, pemasang iklan, sekaligus publik. Ini menjadi konteks hadirnya jurnalisme profesional yang menegaskan bahwa ruang redaksi sebaiknya tidak dipengaruhi agenda politik pemilik modal, pemasang iklan, editor, bahkan jurnalis itu sendiri. Jargon objektivitas dan netralitas menjadi jargon yang didengungkan kala itu.

Pada praktiknya jurnalisme profesional hanya menyoroti kebusukan kekuasaan politik, tidak pemilik modal maupun pengiklan. Hal-hal buruk menyangkut pemilik modal diabaikan, termasuk afiliasi politiknya. Bahkan liputan yang dilakukan terasa dangkal karena para jurnalis lebih memilih informasi yang datang dari pernyataan resmi pemerintah dan kalangan bisnis sebagai berita yang bernilai. Kegiatan semacam ini tentu saja tidak membutuhkan energi yang besar dan sangat menguntungkan dari pada melakukan peliputan investigasi. Di sisi lain, model peliputan semacam ini memberikan peluang besar bagi politisi dan figur publik memanipulasi informasi karena mereka tahu bahwa mereka menjadi sumber berita yang penting. Dampaknya, masyarakat sulit mendapatkan informasi secara jelas dan kritis.

Tatkala pemilik modal begitu bernafsu mengejar keuntungan, maka bisnis media digunakan untuk menampung beragam iklan. Apapun akan dijual demi akumulasi kapital. Situasi ini akan menjadi sangat parah ketika media hanya dimiliki segelintir orang tertentu. McChesney (2008), mengutip Walter Cronkite, dalam konteks pemberitaan TV, tekanan komersialisasi telah mengubah jurnalisme (TV) menjadi suatu pendangkalan. Berita yang disajikan, seperti *feature* misalnya, penuh dengan omong-kosong. Berita tidak lagi ditentukan oleh kepentingan publik, melainkan kepentingan pemilik modal dan pemasang iklan.

Fakta lain adalah, masih merujuk McChesney (2008), demi prinsip efisiensi, jurnalis dipecah dan berita diambil dari sindikasi yang biayanya jelas lebih murah daripada menggaji jurnalis untuk meliput. Campur tangan pemilik media dalam ruang redaksi, langsung maupun tidak, juga menjadi-jadi. Dampaknya adalah sikap kritis yang harusnya melekat kuat pada sikap jurnalis menjadi lumpuh. Dengan semakin sedikitnya jurnalis (yang kritis), dana yang dihemat, gaji dan moral yang semakin rendah maka jurnalisme hanya menyajikan liputan ala kadarnya.

Situasi jurnalisme di Amerika seperti yang telah dijelaskan di atas, agak mirip dengan situasi di Indonesia. Terutama ketika pasar mulai masuk ke dalam sendi-sendi pers dan kontrol pemerintah terhadap pers hilang. Beberapa media besar dimiliki segelintir orang yang haus akan kekuasaan dan akumulasi kapital. Ruang redaksinya tak lagi menjadi ruang steril yang bisa lepas dari campur-tangan pemilik. Jika si pemilik tertarik berpolitik maka ia akan menggunakan medianya agar tujuan politiknya tercapai. Namun jika si pemilik tidak begitu tertarik berpolitik, maka ia akan menggunakan medianya untuk kepentingan akumulasi kapital, sebesar-besarnya. Di sisi lain, sebagian besar jurnalis Indonesia juga masih diberi upah di bawah standar. Cara berpikirnya dirombak untuk mengangkat peristiwa-peristiwa yang berpotensi dibaca, ditonton dan didengar khalayak, sehingga berita-berita yang tidak termasuk dalam kategori bernilai akan disingkirkan. Berita-berita yang bisa memancing pengiklan mendominasi. Jangan berharap pada liputan-liputan investigasi karena ruang redaksi akan memilih peliputan yang murah dan mampu mendulang pembaca serta tidak menyinggung

parapihak yang memberikan keuntungan bagi redaksi.

McChesney (2013) juga menunjukkan bahwa bahwa praktik jurnalisme di ranah *online* erat kaitannya dengan persoalan konglomerasi, untung-rugi, kualitas jurnalisme, dan rusaknya demokrasi. Kehadiran internet juga belum mampu memberikan jawaban atas masalah jurnalisme yang selama ini telah hadir. Penurunan kualitas jurnalisme masih saja terjadi. Praktik jurnalisme yang dianggap berkualitas, seperti investigasi terus menyusut, jika enggan menyebutnya menghilang. Kualitas jurnalisme profesional, bahkan dalam format digital, sudah sulit dilepaskan dari logika pendapatan (iklan). Apa yang dikemukakan oleh McChesney ini menguatkan asumsi bahwa kehadiran internet tidak serta merta bisa memperbaiki situasi jurnalisme yang sebelumnya memang bermasalah, termasuk soal konglomerasi media. Internet dengan logika kerjanya, pada praktiknya mulai menghancurkan jurnalisme itu sendiri. Atas nama kecepatan, sejumlah jurnalis enggan melakukan verifikasi atas berita yang dilaporkannya. Bahkan, karena tingginya target berita tayang yang dituntut oleh redaksi, mereka pun enggan mendalami peristiwa.

Tapi bukan berarti kehadiran internet selalu bermasalah. Melalui internet pula, McChesney (2013:194-197) menyebut ada upaya-upaya alternatif yang dilakukan oleh kalangan nonjurnalis profesional dalam menyampaikan informasi yang penting buat publik melalui *platform blog*, bukan melalui media *online* komersial. Fenomena *Wikileaks* adalah contoh yang mengejutkan bagi banyak pihak, terutama jurnalis profesional yang harus ekstra keras memeriksa materi sekaligus menerjemahkan data-data ke dalam bahasa yang lebih populer. Penguasa yang merasa terkait dengan skandal yang diungkap dalam *Wikileaks* juga sulit menahan peredaran informasi itu. Ada juga media nirlaba *ProPublica* ber-*platform online* berisi jurnalis-jurnalis hebat yang pernah bekerja di media komersial. Media ini berhasil mendapatkan sejumlah penghargaan bergengsi, termasuk Pulitzer, atas pemberitaan berkategori pelayanan publik. Teknologi internet, meskipun awal peruntukannya kepada publik demi tujuan komersial, sangat mungkin digunakan untuk tujuan-tujuan kepentingan publik dan nonkomersial. Upaya-upaya ini bisa dibaca sebagai bentuk kritik atas kerja jurnalisme profesional di media-media komersial yang memprihatinkan. Siapapun bisa bersiasat memanfaatkan internet yang sarat dengan praktik-praktik kapitalistik untuk menyampaikan pesan-pesan tandingan.

Kembali pada persoalan jurnalisme warga, kehadirannya tak terlepas dari konsep warga yang melekat pada jurnalisme dan karena perkembangan teknologi internet, disertai praktik jurnalisme profesional yang bermasalah, maka pilihan pelibatan warga dalam mengelola dan menyampaikan informasi menjadi lebih terbuka. Kehadirannya juga didukung oleh semangat memberikan informasi alternatif yang tidak atau jarang diangkat oleh jurnalisme profesional karena alasan propasar. Menurut catatan Hughes (2010), hingga tahun 1988 masyarakat, masih dalam konteks Amerika Serikat, merasa tidak percaya pada media arus utama. Ditambah lagi kesinisan masyarakat terhadap politik di Amerika pada masa itu. Akhirnya, karena kritik terus bermunculan dari berbagai kalangan, termasuk dari akademisi dan jurnalis, media arus utama mencoba untuk memproduksi berita yang berguna untuk kepentingan masyarakat umum. Wartawan menjadi lebih aktif dalam memberitakan suara rakyat dan keberagaman budaya di

Amerika. Dari sanalah muncul istilah *civic journalism* (jurnalisme publik). Namun *civic journalism* ini tidak bertahan lama karena pada praktiknya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Meskipun demikian, kehadiran praktik dan wacana *civic journalism* ini menumbuhkan konsep jurnalisme warga di masyarakat. Banyak aktivis pada masa itu membuat web yang mengizinkan masyarakat untuk ikut berpendapat dan memberikan informasi. Dari sinilah tren jurnalisme warga muncul.

Tabel 1. Jurnalisme Warga dan Dinamikanya

Jurnalisme warga adalah proses produksi informasi yang dilakukan warga biasa atas peristiwa yang terjadi di sekitarnya di berbagai media. Praktiknya timpang dan diskriminatif.		
Benihnya telah lama ada, bahkan lebih tua dari usia jurnalisme profesional.	Semakin ramai didiskusikan dan masif dikelola setelah peristiwa bencana tsunami yang melanda Asia Timur dan Tenggara tahun 2004.	Sebelum istilah jurnalisme warga (<i>citizen journalism</i>) muncul, telah ada istilah sejenis/mirip, yakni: <i>participatory journalism, democratic journalism, civic journalism, alternative journalism</i> , dan sebagainya.
Hal yang melatari kemunculannya: dosa jurnalisme profesional, teknologi, situasi di mana jurnalisme profesional sejak awal keberadaannya tidak bisa dilepaskan dari warga, dan peluang mendapatkan keuntungan.	Kepentingan yang melatari: jurnalisme profesional, demokrasi (kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat), dan pasar. Ketiganya saling terkait satu sama lain.	Dilema jurnalisme warga: meskipun dikelola demi kepentingan jurnalisme profesional, posisinya tidak sama dengan jurnalisme profesional.

(Sumber: Hasil Penelitian, 2019)

Kovach & Rosenstiel (2001) mengatakan bahwa teknologi baru bersama dengan globalisasi dan konglomerasi media menimbulkan pergeseran model jurnalisme dari profesional ke warga sehingga kondisi ini diharapkan bisa mendukung demokrasi, terutama dalam konteks kebebasan berpendapat. Jurnalisme profesional harus mendefinisikan ulang keberadaannya dan beradaptasi secepatnya jika tidak ingin digeser dari posisi dominannya. Tapi, menurut kami dan nantinya akan terlihat dalam penelitian ini, ketika jurnalisme profesional mulai beradaptasi dan merangkul atau turut mengelola jurnalisme warga, yang terjadi selanjutnya adalah praktik eksploitasi terhadap jurnalisme warga. Jurnalisme warga dikelola bukan sekedar untuk mengakomodasi publik dalam berpartisipasi menyampaikan informasi (pembuat sekaligus penikmat), tapi juga untuk tujuan-tujuan ideologis dan ekonomi-politis.

Dinamika Jurnalisme Warga di Indonesia

Praktik jurnalisme warga di Indonesia mulai berkembang seiring berkembangnya wacana jurnalisme warga di dunia. Argumen ini bukan berarti menganggap bahwa jurnalisme warga di Indonesia adalah praktik yang baru. Jurnalisme warga di Indonesia, jika merujuk pada argumen yang lebih cair bahwa jurnalisme warga setara jurnalisme itu sendiri bahkan lebih lama – termasuk juga argumen bahwa praktiknya merupakan aktivitas warga dalam menyampaikan beragam informasi dengan gayanya yang khas, mulai bisa dilacak sebelum kegiatan jurnalisme di dunia muncul. Penemuan-penemuan prasasti kuno dan kitab-kitab kuno mungkin bisa dijadikan pertimbangan, termasuk aktivitas kaum terpelajar Indonesia dan para pedagang dalam menyampaikan informasi pada masa penjajahan kolonial Belanda melalui pamflet-pamflet dan penerbitan. Di Indonesia, keterlibatan warga dalam menyampaikan informasi juga bisa dilacak pada masa penjajahan kolonial Belanda. Saat itu siapa saja dari beragam kalangan mencoba menyampaikan informasi maupun opini di berbagai penerbitan (Adam, 1995). Namun, pada bagian ini kami tidak akan mengupas hal tersebut lebih jauh karena membutuhkan riset yang mendalam lagi. Kami akan fokus membahas dinamika jurnalisme warga Indonesia pasca terminologi jurnalisme warga mulai ramai didiskusikan, yakni di awal-awal tahun 2000-an dan semakin hangat pasca bencana tsunami 2004. Pada masa itu, internet mulai masif.

Menurut Hill & Sen (2005:56-57), internet di Indonesia mulai berkembang sekitar pertengahan 90-an. Lanjut Hil dan Sen, penggunaan internet pada saat itu terbatas hanya untuk kalangan terbatas saja. Terhitung ada 15 ribu pengguna internet dan 5 perusahaan penyedia layanan internet pada masa itu. Lalu, pada pertengahan 1996, pengguna internet menjadi bertambah menjadi 110 ribu pengguna dengan 15 penyedia layanan. Selanjutnya, pada Mei 1997 pengguna internet di Indonesia meningkat menjadi 348 ribu pengguna. Pemerintah juga telah mengeluarkan izin pada 41 penyedia layanan dimana hanya 38 diantaranya yang beroperasi. Pada 1998 pertumbuhan pengguna internet di Indonesia mengalami perlambatan karena krisis moneter melanda. Setahun berikutnya, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJI) mengklaim pengguna internet di Indonesia meningkat drastis pada tahun 1999 mencapai satu juta pengguna dengan 250 ribu *subscribers* berbayar. Seiring waktu, pengguna internet di Indonesia terus bertambah hingga tahun 2004 tercatat pengguna mencapai 12 juta. Salah satu dampak perkembangan internet adalah mulai bermunculan media-media *online*, termasuk *blog*.

Jurnalisme warga di Indonesia, menurut Wedhaswary (2009), meski sudah mulai diakomodasi oleh media TV dan radio dalam skala terbatas pascareformasi, semakin berkembang pesat ketika media-media *online* mulai tumbuh. *Website* dan *weblog*, menurutnya, mampu menawarkan pola komunikasi yang interaktif. Sehingga tercipta ruang bagi warga menyampaikan aspirasinya secara lebih bebas dan luas. Menurut catatannya, media-media berbasis *online* yang mengakomodir jurnalisme warga di fase ini adalah *Panyingkul.com*, *Wikimu.com*, *Halamansatu*, *Sumbawanews*, dan *Kabarindonesia* yang dikelola dari Belanda. Semuanya berbasis web. Catatan lain menyebut, cikal bakal jurnalisme warga berbasis web adalah *Apakabar*, *Rumahkiri*, dan *Kilasan* (Adiputra dalam Ningtyas (2014). Dari semuanya,

hanya *KabarIndonesia* yang masih eksis hingga kini. Sementara *Apakabar* yang hadir pada 90-an adalah forum berbasis internet yang dimoderatori oleh MacDougall di Maryland, Amerika Serikat. *Apakabar* berhenti pada tahun 2002. *Apakabar*, menurut Hill & Sen (2005), menjadi pengganggu terbesar bagi pemerintah Indonesia pada masa itu dalam upayanya mengontrol informasi. Forum ini menjadi wahana penyeberluasan informasi yang penting bebas sensor, bahkan menjadi rujukan bagi aktivis dan pers di masa itu.

Geliat jurnalisme warga di Indonesia pada masa itu masih sebatas euforia bahwa jurnalisme warga adalah praktik penyebarluasan informasi yang bisa dilakukan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja tanpa harus tergantung pada media dominan dan kontrol negara. Sementara, perdebatan soal perlindungan hukum, persaingan dengan jurnalis profesional, dan etika masih belum tuntas. Pada 2012, Tempo Institute mengumpulkan berbagai media-media yang mengelola jurnalisme warga termasuk individu-individu yang terlibat aktif dalam penyebarluasan informasi. Peserta diajak berdiskusi seputar jurnalisme warga selama dua hari, 14 – 15 April, di Museum Nasional Jakarta dalam tajuk Festival Jurnalisme Warga. Direktur Tempo Institute Mardiyah Chamim mengatakan bahwa acara yang didanai oleh World Bank ini merupakan bentuk kampanye pemantauan kebijakan publik yang akuntabel dan transparan melalui praktik jurnalisme warga. Komunitas-komunitas yang terlibat dalam praktik penyebarluasan informasi di akar rumput dari berbagai wilayah di Indonesia diundang hadir. “*Nah*, kita ketemu dan membahas, kayaknya perlu festival,*deh*. Biar teman-teman yang bercerita praktek di lapangan kayak apa modelnya,” jelas Chamim (Wawancara, 28 Oktober 2017).

Sebagai pemantik acara, sebuah akun Twitter @ayobersuara dibuat oleh panitia pada Maret 2012. Aktivitas akun ini terhenti pada *retweet* terakhir pada akun @Menjadi_ID yang berkicau tentang ucapan selamat mudik 2013 dan mengajak melakukan pantauan sepanjang jalur perjalanan menuju kampung halaman. Media sosial seperti Twitter ini digunakan untuk menampung informasi dari warga, terutama mengenai fasilitas publik. “*Nah*, cuma dalam pemahamannya itukan butuh *effort* ya untuk merawatnya. Awal-awal *sih* cukup lumayan (aktivitasnya), misalnya ketika isu air muncul. *Nah* belakangan sudah *engga*,” ungkap Chamim (Wawancara, 28 Oktober 2017).

Dalam acara itu, diskusi soal problematika jurnalisme warga kembali mengemuka. Salah satunya adalah persoalan ketimpangan informasi di media-media arus utama yang kurang memberi ruang atas isu lokal, sementara ada banyak hal-hal positif yang terjadi di daerah yang penting diinformasikan. Jurnalisme warga dianggap penting karena mampu menyuarakan yang tidak tersuarakan. Keberadaannya penting bagi demokratisasi informasi dan sebagai penyeimbang informasi. Menurut salah satu panitia, Budi Hermanto, persoalan etika yang perlu dilekatkan pada praktik jurnalisme warga juga tak luput didiskusikan dalam festival tersebut. “Saya ingat itu teman-teman menyepakati bahwa harus ada rambu-rambu soal etika jurnalistiknya. Artinya soal *cover both side*, soal ya etika-etika jurnalistik yang berlaku umum itu juga harus dipahami oleh teman-teman jurnalisme warga,” kata Hermanto (Wawancara, 9 November 2017).

Selain persoalan etika, pengakuan terhadap warga yang terlibat dalam penyebarluasan

informasi masih menjadi persoalan. Namun setidaknya, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia telah memulai menerima kontributor warga termasuk juga *blogger* sebagai anggotanya sejak 2014. Penerimaan ini didasarkan pada keputusan Kongres AJI Indonesia ke-IX di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 27-29 November 2014. Kongres ini menyepakati menerima jurnalis warga sebagai anggota dengan sejumlah syarat tertentu. Sebelumnya, keanggotaan AJI Indonesia hanya terbatas pada jurnalis media arus utama. Mantan Ketua AJI Indonesia, Suwarjono mengatakan bahwa penerimaan ini terkait dengan semangat AJI di masa lalu yang menolak segala bentuk pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat. AJI, jelas Suwarjono, mempunyai sikap bahwa setiap orang bebas membuat karya jurnalistik tanpa harus berada dalam satu media, terutama media-media arus utama:

“Ada teman-teman yang tidak punya media sendiri... tetap dia harus diakui memang, sepanjang karyanya (memenuhi) standar jurnalistik. Mau dia ditulis dalam *platform* Facebook, mau ditulis di Twitter, atau masuk di Instagram, atau di *blog*, atau di (media) jurnalisme warga tempat yang lain, sepanjang karyanya adalah memang karya-karya jurnalistik, bisa diakui sebagai jurnalis dan itu bisa masuk menjadi anggota AJI.” (Suwarjono, Wawancara, 2 November 2017)

Sebelum keputusan itu dibuat, perdebatan serius mengemuka di antara anggota dan pengurus AJI. Isu yang mencuat adalah sejauh mana perlindungan yang bisa diberikan tatkala AJI menerima *blogger* sebagai anggotanya. Perlu dipahami bahwa praktik jurnalis profesional di Indonesia dilindungi oleh UU Pers No. 40/1999. Jika terjadi sengketa pers, sudah ada mekanisme hukumnya. Sementara, jika *blogger* bergabung menjadi anggota AJI maka perlindungan hukumnya perlu dipertegas:

“Undang-Undang Pers yang ada di kita ini adalah, mereka baru bisa melindungi karya-karya yang masuk di media *mainstream*, mempunyai badan hukum, mempunyai unit usaha industri. Sementara kalau mereka masuk ditampilkan sebagai *blog*, media sosial, (maka) karya-karya mereka apabila menghadapi perselisihan pemberitaan, tidak ada, tidak diatur, tidak diakui, dan tidak masuk di ranah Undang-Undang Pers, dan Dewan Pers tidak bisa memediasi, melindungi mereka. ...perdebatannya adalah di situ.” (Suwarjono, Wawancara, 2 November 2017)

Bagi jurnalis warga agar bisa menjadi anggota AJI harus memiliki 12 karya jurnalistik dalam setahun terakhir disertai rekomendasi dari anggota AJI dan sejumlah syarat lainnya. Pengurus AJI di tiap kota akan menyeleksi. Jika lolos, maka pelamar akan diundang untuk wawancara dengan pengurus AJI di masing-masing kota. Upaya AJI jika ternyata anggotanya yang merupakan jurnalis warga tertimpa perkara pers adalah berupaya melakukan advokasi di berbagai lini. Salah satunya adalah dengan meminta bantuan Dewan Pers untuk memediasinya:

“Selama ini yang kami carikan cantolan memang undang-undang yang tertinggi, pasal 28F UUD 1945 (tentang) kebebasan berekspresi. Ya, isunya terkait dengan kebebasan berekspresi, ya. Karena Undang Undang Pers memang tidak bisa (digunakan). Tapi juga, tidak menutup kemungkinan kami melakukan lobi-lobi ke Dewan Pers, untuk mengajak Dewan Pers sadar kalau namanya produk jurnalistik ya tetap harus dihargai (sebagai) sebuah (karya) jurnalistik. Meskipun dia *platform*-nya berbeda. Meskipun ini cukup berat. Terutama apabila ditampilkan di media sosial. Misalnya di Facebook, di

Youtube, dan lain-lain. Dewan Pers memang tidak masuk dan tidak mau. Tapi kalau tampilannya di *website*, *blog* yang independen, meskipun tidak punya badan hukum, dia (Dewan Pers) masih bersedia melakukan mediasi.” (Suarjono, Wawancara, 2 November 2017)

Meskipun praktik jurnalisme warga mulai mendapat tempat, persoalan perlindungan hukum jika terjadi sengketa masih menghantuinya. AJI saja yang telah menerima keberadaan jurnalisme warga, tidak mampu menjamin sepenuhnya perlindungan hukum jika anggotanya yang nonjurnalis tertimpa sengketa atas konten yang dihasilkan. AJI hanya menjanjikan upaya yang serius untuk mengadvokasi kasus dengan menjalin kerja sama antarlembaga yang memiliki fokus pada kebebasan berekspresi, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers. Penyelesaian sengketa akan terasa lebih mudah jika menggunakan UU Pers. Namun, sekali lagi, praktik jurnalisme warga tidak masuk ke dalam ranah pers sehingga tak bisa dilindungi dengan UU Pers.

Perlindungan hukum menjadi tantangan serius bagi kontributor warga di tengah berkembangnya praktik jurnalisme warga. Pada 29 Juni 2019, pegiat media warga nirlaba menuntut adanya pengakuan dan perlindungan hukum bagi mereka. Pegiat media warga ini berasal dari *BaleBengong*, *Tatkala*, *Nusa Penida Media*, *Warta Desa*, *Marsinah FM*, *Speaker Kampung*, dan sejumlah organisasi pers mahasiswa. Mereka berkumpul mendiskusikan intimidasi yang didapat kontributor warga dalam menyampaikan informasi. Bentuk-bentuk intimidasi yang mereka dapatkan berupa ancaman melalui pesan singkat, media sosial, telepon, hingga kekerasan fisik dari para pihak yang “terganggu” atas informasi yang diwartakan. Mereka meminta secara khusus kepada Dewan Pers agar membuat mekanisme menjaga kualitas bagi kontributor warga dan media warga, mengadvokasi keberadaan mereka, membangun jaringan perlindungan hukum, sekaligus menyiapkan rancangan aturannya. Mereka menekankan bahwa aktivitas warga dalam menyampaikan informasi merupakan bagian dari kebebasan berekspresi (AJI Surabaya, 2019).

Sementara itu, di wilayah media yang berfokus mencari keuntungan, pengelolaan konten warga terus muncul dan berkembang, silih berganti. *Metro TV*, misalnya, setelah tak lagi menjalankan program *Wideshot*, redaksi masih terus mengakomodir informasi dari warga yang tayang di beragam program. Radio *Elshinta*, yang oleh Kurniawan(2007) dianggap mulai menjalankan praktik jurnalisme warga sejak awal 2000-an, masih terus mengembangkan program *IdA* (Informasi dari Anda). *IdA* adalah program yang mengakomodir beragam informasi dari pendengar *Elshinta*. Menurut Wakil Pemimpin Redaksi Radio *Elshinta*, Haryo Ristamadji (Wawancara, 17 Juli 2018) *IdA* mampu menjaga stabilitas eksistensi Radio *Elshinta* hingga kini. Informasi yang berasal dari warga ini membuat *Elshinta* semakin dekat dengan pendengarnya. *NET TV*, sebagai TV pendatang baru di Indonesia, masih memelihara program *NET CJ*, program yang mengakomodir video yang berasal dari warga. Produser Senior *NET CJ*, Thomas Herda (Wawancara, 18 Juli 2018) mengatakan bahwa potensi kontribusi warga dalam menyampaikan informasi via video masih besar. Program-program berita *NET TV* semakin kaya dan terbantu dengan hadirnya video informasi dari warga. Pendatang baru portal berita *IDNTimes* juga mendapat berkah dari pengelolaan konten warga yang mereka sebut sebagai *community content*. Redaktornya, Ernia (Wawancara, 1 Agustus 2018) menyebut

bahwa konten warga memasok hampir setengah konten keseluruhan di *IDNTimes*. Timnya berupaya memilah-milah konten terbaik yang berpotensi mendulang trafik untuk ditampilkan. Konten warga begitu menjanjikan bagi media-media tersebut.

Simpulan

Jurnalisme warga mulai ramai diperbincangkan, diperdebatkan dan dikelola oleh beragam media pasca peristiwa tsunami 2004 yang melanda Asia Tenggara dan Timur. Sebelumnya telah ada diskusi-diskusi mengenai keterlibatan warga dalam proses produksi berita. Saat itu istilah yang muncul menggambarkan keterlibatan warga adalah *participatory journalism*, *democratic journalism*, *civic journalism*, bahkan *alternative journalism*. Prinsipnya pada dasarnya sama, yakni mengutamakan keberpihakan pada publik dan melibatkannya sebagai subjek informasi yang aktif. Namun jauh sebelum itu, pola-pola semacam ini sebenarnya telah muncul. Terutama jika menggunakan definisi bahwa jurnalisme warga adalah praktik di mana warga, siapapun tapi bukan jurnalis profesional, menyampaikan informasi dalam media apapun. *Acta Diurna* bisa dijadikan pertimbangan bahwa warga (karena pada saat *Acta Diurna* muncul profesi jurnalis belum ada) telah terlibat dalam proses penyampaian informasi pada masanya. Ataupun catatan dan prasasti kuno zaman kerajaan di nusantara, juga lukisan-lukisan di gua di zaman purbakala bisa didiskusikan untuk melihat praktik penyebaran informasi oleh siapapun. Asumsi ini muncul dengan menempatkan definisi jurnalisme warga yang cair tanpa batas-batas apapun, misalnya sesesudah aksara dikenal ataupun penerbitan masa lalu lahir.

Kehadiran jurnalisme warga yang masif tak lepas dari kritik terhadap jurnalisme profesional yang partisan dan terlalu berorientasi pada pasar sehingga keberpihakan pada publik dinomorduakan. Faktor lainnya adalah perkembangan teknologi internet yang memungkinkan siapa saja mengakses dan memproduksi informasi. Namun yang tak bisa dipungkiri bahwa jurnalisme sendiri sudah sejak awal diposisikan tidak boleh lepas dari warga, baik sebagai khalayaknya, arah redaksi, maupun kapasitasnya dalam menyampaikan informasi. Selain itu, ada peluang mendapatkan keuntungan jika bisa mengelolanya dengan baik.

Kepentingan-kepentingan yang muncul dari proses awal kehadiran jurnalisme warga adalah jurnalisme itu sendiri (jurnalisme profesional), demokrasi (kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat), serta pasar. Ketiganya saling terkait satu sama lain. Keberadaan jurnalisme profesional takkan bisa berjalan baik tanpa kehadiran demokrasi. Sementara demokrasi membutuhkan jurnalisme yang profesional sebagai kontrol kekuasaan dan wahana beragam pendapat. Tanpa pasar, jurnalisme profesional takkan bisa menjalankan perannya dengan baik demi publik. Sayangnya, meski dalam praktiknya jurnalisme warga menggunakan prinsip-prinsip jurnalisme profesional (termasuk telah diakui dan dibesarkan oleh jurnalisme profesional), posisi jurnalisme warga tidaklah sebaik jurnalisme profesional yang keberadaannya telah diakui oleh UU Pers. Jurnalisme warga bukanlah pers. Jika terjadi masalah hukum terkait konten yang merugikan pihak lain, salah satunya melalui UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), kontributor warga bisa diperkarakan dan dipenjarakan. Menjadi berbeda jika ia merupakan produk pers atau bagian dari pers, maka kasus sengketa akan terlebih

dahulu diselesaikan melalui mediasi Dewan Pers. Padahal keberadaannya amat penting bagi jurnalisme profesional, baik sebagai bagian dari eksistensi jurnalisme profesional yang harus selalu bersama warga, juga berkontribusi dalam menambah trafik media induknya yang berujung pada akumulasi kapital. Inilah dilema jurnalisme warga.

Daftar Pustaka

- Adam, A. (1995). *Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan 1855-1913*. Jakarta: Hadtra Mitra.
- Allan, S. (2009). Histories of Citizen Journalism. In S. Allan & E. Thorsen (Eds.), *Citizen Journalism: Global Perspectives* (pp. 17–31). New York: Peter Lang Inc.
- Atton, C. (2003). What is “alternative” journalism? *Journalism*, 4(3), 267–272. <https://doi.org/10.1177/14648849030043001>
- Bagdikian, B. H. (2004). *The New Media Monopoly* (Vol. 45). <https://doi.org/10.1111/j.1468-2435.2007.00404.x>
- Baran, S. J. (2011). *Pengantar Komunikasi Massa: Literasi Media dan Budaya*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Bowman, B. S., & Willis, C. (2003). *We Media: How audiences are shaping the future of news and information*. Retrieved from http://www.hypergene.net/wemedia/download/we_media.pdf
- Campbell, V. (2014). Theorizing Citizenship in Citizen Journalism. *Digital Journalism*, 3(5), 704–719. <https://doi.org/10.1080/21670811.2014.937150>
- Eddyono, A. S., HT, F., & Irawanto, B. (2019). Jurnalisme Warga: Liyan, Timpang dan Diskriminatif. *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 12(1), 61. <https://doi.org/10.14421/pjk.v12i1.1498>
- Gillmor, D. (2006). *We the Media: Grassroots Journalism By the People, For the People*. <https://doi.org/>
- Hajek, R., & Stefanikova, S. (2014). Citizen Journalims Is as Old as Journalism Itself: An Interview with Stuart Allan. Retrieved October 23, 2018, from Mediani Studia website: <http://orca.cf.ac.uk/id/eprint/70685>
- Hill, D. T., & Sen, K. (2005). The Internet in Indonesia’s New Democracy. In *The Internet in Indonesia’s New Democracy*. <https://doi.org/10.4324/9780203403273>
- Hughes, W. (2010). *Citizen Journalism: Historical Roots and Contemporary Challenges*. Honors College Capstone Experience/Thesis Projects.
- Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2001). *Elemen-elemen Jurnalisme*. Jakarta: ISAI.
- Kurniawan, M. N. (2007). Jurnalisme warga di Indonesia, prospek dan tantangannya (‘Citizen journalism in Indonesia, prospects and challenges’). *Makara, Sosial Humaniora*, 11(2), 71–78.
- Lasica, J. D. (2003). What is The Participatory Journalism?
- McChesney, R. W. (1999). *Rich Media Poor Democracy: Communication Politics in Dubious Times*. New York: The New Press.

- McChesney, R. W. (2008). *The Political Economy of Media: Enduring Issues, Emerging Dilemmas*. New York: Montly Review Press.
- McChesney, R. W. (2013). *Digital Disconnect: How Capitals is Turning the Internet Againts Democracy*. New York: The New Press.
- Ningtya, I. (2014). Demokrasi Media Melalui Jurnalisme Warga. Retrieved from Remotivi.or.id website: <http://www.remotivi.or.id/amatan/33/Demokratisasi-Media-Melalui-Jurnalisme-Warga>
- Nugraha, P. (2012). *Cotozen Journalism: Pendangan, Pemahaman, dan Pengalaman*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Oetama, J. (2001). *Pers Indonesia: Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Outing, S. (2005). The 11 Layers of Citizen Journalism. Retrieved March 14, 2017, from Poyter.org website: <https://www.poynter.org/archive/2005/the-11-layers-of-citizen-journalism/>
- Rohmatulloh, S., & Yudhapramesti, P. (2019). Pola Pengelolaan Redaksi Pada Jurnalisme Warga di Program “RRI 30 detik.” *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 2(2). Retrieved from <http://jurnal.unpad.ac.id/kajian-jurnalisme/article/view/21359>
- Saukko, P. (2003). *Doing Research in Cultural Studies : An Introduction to Classical and New Methodological Approaches*. Retrieved from http://www.freelists.org/archives/kbmugm2014/10-2014/pdfMKXw_IZ8Q6.pdf
- Surabaya, A. (2019). Pegiat Media Warga Menuntut Pengakuan dan Perlindungan Hukum. Retrieved July 14, 2019, from Siaran Pers website: <http://www.ajisurabaya.org/2019/06/30/siaran-pers-pegiat-media-warga-menuntut-pengakuan-dan-perlindungan-hukum/>
- Wedhaswary, I. D. (2009). *Perkembangan Warga di Indonesia (Studi Kasus pada Metro TV, Radio Elshinta, Kompas.com, Penyingkul.com)*. Universitas Gajah Mada.